BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 507 / XII /2013

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan President Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan President Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

18. PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Kabupaten Luwu UtaraTahun Anggaran 2014, sebagaimana besaran dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas paling tinggi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Tahun Anggaran 2014 Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 16 Desember 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Insprktur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Masamba.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 507 / XI1/2013

TANGGAL 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	**HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**		Maksimal	
	1.1. PEJABAT PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 450,000	
	b. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 600,000	
	c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 700,000	
	d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 800,000	
	e. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 900,000	
	f. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,100,000	
	h. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	i. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,300,000	
	1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD)		Maksimal	
	a. Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000	
	b. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 450,000	
	c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 600,000	
	d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 700,000	
	e. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 800,000	
	f. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 900,000	
	g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	h. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	i. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	1.3. PEJABAT PEMIMPIN KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT		Maksimal	
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu Perkegiatan s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000	
	b. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 500,000	
	c. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 600,000	
	d. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 650,000	
	e. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 700,000	
	f. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 750,000	
	g. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 880,000	
	h. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	i. Nilai pagu Perkegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	1.4. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 350,000	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 450,000	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 550,000	
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 600,000	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 650,000	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 900,000	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,050,000	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
	1.5. HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 250,000	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 350,000	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 450,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 500,000	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 550,000	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 800,000	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 950,000	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,100,000	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,300,000	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	1.6. HONORARIUM PENGURUS BARANG			
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 500,000	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 550,000	
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 600,000	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 850,000	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,700,000	
	1.7. HONORARIUM PENYIMPAN BARANG			
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 500,000	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 550,000	
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 600,000	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 850,000	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,700,000	
	KHUSUS UNTUK KECAMATAN DAN KELURAHAN :			
	PENGURUS & PENYIMPAN BARANG DIJABAT OLEH 1 ORANG SAJA.			
	1.8. HONORARIUM BENDAHARA PENERIMA			
	a. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400,000	
	b. Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 500,000	
	c. Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 550,000	
	d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 600,000	
	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 850,000	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 1,000,000	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,200,000	
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,700,000	
	1.9. HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA			
	a. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 300,000	
	b. Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 400,000	
	c. Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 450,000	
	d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 500,000	
	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 750,000	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 900,000	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 1,100,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,300,000	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
2	HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA			
	2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		Maksimal	
	- Pejabat Pengadaan di atas Rp 5 Juta sampai dengan 200 Juta	OP	Rp 400,000	Maximun 1 Orang
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 580,000	Maximun 3 orang
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 660,000	Maximun 5 orang
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 745,000	Maximun 5 orang
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 825,000	Maximun 5 orang
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 910,000	Maximun 5 orang
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 1,075,000	Maximun 7 orang
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 1,320,000	Maximun 7 orang
	2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 430,000	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 495,000	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 550,000	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 605,000	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 680,000	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 800,000	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 990,000	
	2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 430,000	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 495,000	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 550,000	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 605,000	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 680,000	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 800,000	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 880,000	
	2.5. BESARNYA HARGA KEGIATAN KONSTRUKSI, JASA			
	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN			
	a. Pada Konstruksi Bangunan Gedung			
	- Perencanaan			
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimun 7 %		
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimun 6.5 %		
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimun 6 %		
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimun 5 %		
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimun 4 %		
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimun 3,75 %		
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimun 3 %		
	8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.20 Miliar	Maksimun 2,5 %		
	9. Nilai pagu dana di atas Rp.20 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	Maksimun 2 %		
	- Pengawasan			
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimun 5 %		
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimun 4.5 %		
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimun 4 %		
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimun 3,5 %		
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimun 3 %		
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimun 2,5 %		
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimun 2 %		

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.20 Miliar	Maksimun 1,5 %		
	9. Nilai pagu dana di atas Rp.20 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	Maksimun 1 %		
	- Biaya Perencanaan untuk desain bangunan yang berulang			
	secara total atau diperhitungkan sebagai berikut :			
	1. Pengulangan pertama	Maksimun 75 %		
	2. Pengulangan kedua	Maksimun 65 %		
	3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing	Maksimun 50 %		
	terhadap komponen biaya perencanaan			
	- Biaya Administrasi dan Persiapan	Maksimun 5 %		
	Catatan :			
	Kecuali Kec.Limbong, Seko dan Rampi Maksimun 8 % dari			
	plafon anggaran			
	b. Pada konstruksi Jalan dan Jembatan			
	- Perencanaan			
	1. Perintisan/Pembukaan Jalan Baru	*Maksimun 5 %*		
	2. Pengerasan Jalan	Maksimun 5 %		
	3. Pengaspalan Jalan	Maksimun 3 %		
	4. Pembangunan Jembatan Beton	Maksimun 4 %		
	5. Pembangunan Jembatan Gantung	Maksimun 4 %		
	6. Pembangunan Plat Duiker	Maksimun 5 %		
	- Pengawasan			
	1. Perintisan/Pembukaan Jalan Baru	Maksimun 4 %		
	2. Pengerasan Jalan	Maksimun 4 %		
	3. Pengaspalan Jalan	Maksimun 3 %		
	4. Pembangunan Jembatan Beton	Maksimun 3 %		
	5. Pembangunan Jembatan Gantung	Maksimun 3 %		
	6. Pembangunan Plat Duiker	Maksimun 3 %		
	- Biaya perencanaan untuk desain bangunan yang berulang			
	secara total atau diperhitungkan sebagai berikut :			
	1. Pengulangan pertama	Maksimun 75 %		
	2. Pengulangan kedua	Maksimun 65 %		
	3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing	Maksimun 50 %		
	terhadap komponen biaya perencanaan			
	- Biaya Administrasi dan Persiapan	Maksimun 5 %		
	Catatan :			
	Kecuali Kec.Limbong, Seko dan Rampi Maksimun 8 % dari			
	plafon anggaran			
3	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA PER PAKET		Maksimal	
	3.1. Pengadaan Barang s/d Rp. 100 Juta dan Konsultan sampai			
	dengan 200 Juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 Juta s.d. Rp.200			
	Juta.			
	a. Ketua	OK	Rp 400,000	
	b. Sekretaris	OK	Rp 300,000	
	c. Anggota	OK	Rp 250,000	
	3.2. Pengadaan Barang diatas Rp.500 Juta dan konsultasi diatas			
	Rp. 200 Juta			
	a. Ketua	OK	Rp 500,000	
	b. Sekretaris	OK	Rp 400,000	
	c. Anggota	OK	Rp 300,000	
4	**NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/**			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	BIMBINGAN TEKNIS/DISEMINASI UNTUK KEGIATAN SKPD			
	4.1. Pejabat I/Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara)	OJ	Rp 1,500,000	Narasumber dari Provinsi & Pusat
	4.2. Pejabat Eselon I / yang di setarakan	OJ	Rp 1,300,000	
	4.3. Pejabat Eselon II / yang di setarakan	OJ	Rp 900,000	
	4.4. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	Rp 800,000	
	4.5. Moderator	OK	Rp 600,000	
5	**HONOR PENYELENGGARA UJIAN**			
	5.1. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan / pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 100,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 500	
	c. Pengawas Ujian	OH	Rp 100,000	
6. 6	**BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KANTOR DAN RUMAH JABATAN**			
	6.1. Makan	Orang/Kali	Rp 20,000	
	6.2. Snack	Orang/Kali	Rp 7,500	
	6.3. Prasmanan	Orang/Kali	Rp 25,000	
7	**PAKAIAN DINAS HARIAN**		**Maksimal**	
	7.1. Pakaian Dinas Harian	**Orang/Tahun/Stel**	**Rp 400,000**	
	7.2. Pakaian Sipil Harian	**Orang/Tahun/Stel**	**Rp 1,000,000**	
	7.3. Pakaian Sipil Lengkap	**Orang/Tahun/Stel**	**Rp 2,000,000**	
	7.4. Pakaian Sipil Resmi	**Orang/Tahun/Stel**	**Rp 1,500,000**	
	7.5. Pakaian Korpri	**Orang/Tahun/Stel**	**Rp 350,000**	
			Maksimal	
8	**PAKAIAN OLAHRAGA**	Orang/Tahun/Stel	Rp 350,000	
9	**AKOMODASI DAN SEWA**		**Maksimal**	
	9.1. Akomodasi Non AC	**Orang/Hari**	**Rp 100,000**	
	9.2. Akomodasi Deluxe/AC	**Orang/Hari**	**Rp 200,000**	
	9.3. Sewa Ruangan Besar (ruang rapat)	**Hari**	**Rp 600,000**	
	9.4. Sewa Ruangan Kecil (ruang rapat)	**Hari**	**Rp 400,000**	
	9.5. Sewa Kendaraan Roda 4	**Unit/Hari**	**Rp 500,000**	
	9.6. Sewa Kendaraan Roda 6 (bus)	**Unit/Hari**	**Rp 2,000,000**	
	9.7. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	**Hari**	**Rp 1,000,000**	
10	**DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL**			
	10.1. Diklat Pimpinan Tk.II	Peserta/Angkatan	Rp 41,000,000	
	10.2. Diklat Pimpinan Tk.III	Peserta/Angkatan	Rp 30,000,000	
	10.3. Diklat Pimpinan Tk.IV	Peserta/Angkatan	Rp 25,000,000	
11	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**			
	- Golongan I & II	Peserta/Angkatan	Rp 4,470,000	
	- Golongan III	Peserta/Angkatan	Rp 5,545,000	
12	**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI**	Paket	Rp 10,000,000	Maksimal
	KINERJA SKPD			
13	**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN**	Paket	Rp 10,000,000	Maksimal
14	**HONORARIUM TAPD (TERMASUK SEKRETARIAT TAPD),**			
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD, INTENSIFIKASI PENINGKATAN			
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & PENINGKATAN TATA KELOLA			
	AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIK			
	(DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI)			
15	**HONORARIUM PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA & SKPD**			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2014	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI			
16	**HONORARIUM PENGELOLA SISTEM PELAYANAN SATU PINTU**			
	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI			
17	**HONORARIUM PEMERIKSAAN (KHUSUS INSPEKTORAT)**			
	17.1. Pemeriksaan Komprehensif	Org/Hari	Rp 425,000	
	17.2. Pemeriksaan khusus Akhir Jabatan Kepala Desa	Org/Hari	Rp 425,000	
	17.3. Pemeriksaan Khusus atas Perintah Pimpinan	Org/Hari	Rp 425,000	
	17.4. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	Org/Hari	Rp 425,000	
	17.5. Pemeriksaan Kasus Kepegawaian	Org/Hari	Rp 350,000	
	17.6. Penyusunan LHP	LHP	Rp 900,000	
	17.7. Reviuw LHP	LHP	Rp 700,000	
18	**HONOR MAJELIS TPTGR**		Maksimal	
	18.1. Ketua Merangkap Anggota	**Orang /Sidang**	**Rp 1,000,000**	
	18.2. Wakil Ketua Merangkap Anggota	**Orang /Sidang**	**Rp 850,000**	
	18.3. Sekretaris Merangkap Anggota	**Orang /Sidang**	**Rp 750,000**	
	18.4. Anggota	**Orang /Sidang**	**Rp 600,000**	
19	**HONOR TIM TINDAK LANJUT**			
	19.1. Ketua	**O/B**	**Rp 500,000**	
	19.2. Wakil Ketua	**O/B**	**Rp 450,000**	
	19.3. Sekretaris	**O/B**	**Rp 400,000**	
	19.4. Anggota	**O/B**	**Rp 300,000**	
20	**HONOR PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN**		**Maksimal**	
	20.1. Pengemudi (Bukan PNS)	**O/B**	**Rp 1,500,000**	
	20.2. Satpam/Pengamanan Kantor (Bukan PNS)	**O/B**	**Rp 1,500,000**	RSUD
21	**LEMBUR**	**OH**	**Rp 15,000**	
22	**JASA PETUGAS TEKNIS KHUSUS PEMELIHARAAN**		**Maksimal**	
	SARANA RUMAH SAKIT			
	22.1. Sub Unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	**O/B**	**Rp 1,500,000**	
	22.2. Sub Unit Sterilisasi	**O/B**	**Rp 1,500,000**	
	22.2. Sub Unit Kamar Mayat	**O/B**	**Rp 800,000**	
23	**BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAN DINAS**			
	23.1. Kendaraan Pejabat Negara	**Unit/Tahun**	**Rp 35,000,000**	
	23.2. Kendaraan Pejabat Eselon II A	**Unit/Tahun**	**Rp 19,000,000**	
	23.3. Kendaraan Pejabat Eselon II B	**Unit/Tahun**	**Rp 10,000,000**	
	23.4. Kendaraan Operasional Double Cabin	**Unit/Tahun**	**Rp 15,000,000**	
	23.5. Kendaraan Roda 4	**Unit/Tahun**	**Rp 9,000,000**	
	23.6. Kendaraan Roda 6 Pemadam Kebakaran	**Unit/Tahun**	**Rp 20,000,000**	
	23.7. Kendaraan Roda 6 Bus Pemda & Dapur Umum	**Unit/Tahun**	**Rp 17,000,000**	
	23.8. Kendaraan Roda 10 Tronton	**Unit/Tahun**	**Rp 20,000,000**	
	23.9. Kendaraan Roda 2	**Unit/Tahun**	**Rp 1,500,000**	
	23.10. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	**Unit/Tahun**	**Rp 10,000,000**	
	23.11. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 250 CC)	**Unit/Tahun**	**Rp 5,000,000**	
	23.12. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 750 CC <)	**Unit/Tahun**	**Rp 7,500,000**	

BUPATI LUWU UTARA,

H. ARIFIN JUNAIDI